

Analysis of the Factors that Affect the Capital Expenditure of the Central Java Provincial Government

Nabila Khoirotunnisa¹ , Mujiyati²

¹ Department of Accountancy, Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia

² Department of Accountancy, Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia

 b200170295@student.ums.ac.id

Abstract

Research on capital expenditure concludes the result of the pros and cons, therefore research on capital expenditure will always attract attention even though reasearchers use varied variables. The purpose of this study is to analyze and examine the effect of Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and Gross Regional Domestic Product on Capital Expenditures. The research method used is a quantitative method. The population in this study is The Regency/City of Central Java Province for the 2017-2019 period. This study uses the saturation sampling method so total sample is 35 consisting of 29 district and 6 cities. The data of this study were tested using multiple linear regression models. The results of this study indicate that Local Own-Source Revenue has a significance value of $0,000 < 0,05$ affecting Capital Expenditures, which means H_1 is acceptable. The General Allocation Fund has a significance value of $0,000 < 0,05$ affecting Capital Expenditures, which means H_2 is acceptable. Revenue Sharing Fund has a significance value of $0,019 < 0,05$ affecting Capital Expenditures, which means H_3 is acceptable. Gross Regional Domestic Product has a significance value of $0,677 > 0,05$ does not affect Capital Expenditure, which means H_4 is rejected.

Keywords: Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Gross Regional Domestic Product, Capital Expenditures.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Penelitian tentang belanja modal menyimpulkan hasil yang pro dan kontra, oleh karena itu penelitian tentang belanja modal akan selalu menarik perhatian meskipun peneliti menggunakan variabel yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh sehingga total sampel ada 35 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data dalam penelitian ini diuji menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ mempengaruhi Belanja Modal yang artinya H_1 dapat diterima. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ mempengaruhi Belanja Modal yang artinya H_2 dapat diterima. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ mempengaruhi Belanja Modal yang artinya H_3 dapat diterima. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,677 > 0,05$ tidak mempengaruhi Belanja Modal yang artinya H_4 ditolak.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Bagi Hasil; Produk Domestik Regional Bruto; Belanja Modal

1. Pendahuluan

Sektor publik merupakan suatu sektor perekonomian yang pelaksanaannya bertujuan kepada penyediaan layanan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dipenuhi oleh pemerintah. Dalam penyediaan layanan publik, pemerintah memerlukan anggaran keuangan untuk merencanakan penerimaan dan pengeluaran berupa belanja untuk satu periode. Penerimaan yang diterima daerah berupa dana dari masyarakat [1]. Pelayanan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal dengan adanya otonomi daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 yang artinya diberikan hak otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah dalam kewenangannya untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan [2]. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, pemerataan daerah, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan inventaris daerah adalah belanja modal. Belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah seperti sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk masyarakat dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan [3]. Selain itu, ketersediaan layanan publik yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan pemerintah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah [4].

Perencanaan pengadaan layanan publik membutuhkan dana yang cukup sehingga sumber-sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berupa Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga penerimaan-penerimaan daerah perlu diperhatikan. Sumber-sumber penerimaan daerah dapat dimaksimalkan untuk menjalankan desentralisasi dan membiayai pengeluaran daerah berupa belanja kebutuhan daerah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti [5], [6], [7], [8], dan [1] dengan menggunakan variabel independen yang berbeda-beda. Dalam penelitian [5] yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh) dengan hasil penelitiannya ditemukan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian terkait belanja modal yang selanjutnya dilakukan oleh [6] dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal serta Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh [7] dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Derajat Desentralisasi dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2013-2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal

sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Ketergantungan Keuangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian [8] yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Bruto Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian [1] yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Modal menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara positif terhadap signifikan Belanja Modal.

Dari hasil penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang tidak konsisten sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang belanja modal dengan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh [8]. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini ditambah variabel yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang direplikasi dari penelitian [8]. Bertitik tolak dari hal-hal diatas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH”**.

2. Literatur Review

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan pekerjaan/layanan atas nama prinsipal dengan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada pihak agen [9]. Dalam sektor publik, teori keagenan ini dapat diimplikasikan terhadap hubungan pemerintah daerah selaku agen dan masyarakat selaku prinsipal karena pemerintah daerah bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan segala keputusannya diharapkan memberikan keuntungan untuk masyarakat. Masyarakat memiliki hak pengaturan terhadap pemerintah selaku pemberi sumber daya berupa pajak dan pungutan pemerintah lainnya. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan publik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada publik sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja pemerintah terkait.

2.2. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan para manajer tidak termotivasi oleh kepentingan individu namun lebih terfokus pada hasil utama untuk kepentingan organisasi [10]. Dalam sektor publik, teori *stewardship* ini dapat diimplikasikan terhadap tindakan pemerintah daerah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat dan organisasi serta tidak terfokus pada keuntungan yang diperoleh maupun kepentingan pribadinya. Selain itu, teori ini juga dapat diimplikasikan terhadap akuntabilitas organisasi sektor publik karena dibutuhkan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh masyarakat yang menjadi pertanggungjawaban pemerintah

daerah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas melalui sosialisasi atau publikasi ke website resmi Pemerintah terkait sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Pelaksanaan tugas pemerintahan memerlukan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya sehingga meminimalisir adanya perbedaan kepentingan setiap individu.

2.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah anggaran yang dikeluarkan guna mendapatkan aset tetap ataupun aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Belanja modal berupa belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud. Belanja modal berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Belanja modal erat kaitannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal diharapkan dapat dikeluarkan dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat.

Anggaran dana belanja modal dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah sebagai penunjang program pemerintah daerah yang sifatnya jangka panjang. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan publik yang tersedia berupa fasilitas, sarana dan prasarana, serta infrastruktur seperti yang ditegaskan oleh [3] bahwa alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki peran penting dalam pelaksanaan desentralisasi yang digunakan sebagai penunjang pendanaan pengadaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan publik yang baik akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang digambarkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang peningkatan investasi publik dalam bentuk infrastruktur. Infrastruktur daerah yang memadai dapat memberikan layanan publik yang optimal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan [11]. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sehingga produktifitasnya semakin meningkat dan menarik investor untuk membuka usaha di daerahnya [8].

Investasi yang dilakukan oleh para investor di daerah-daerah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi terhadap pembangunan daerah yang bersangkutan [12]. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi aktivitas yang dilakukan oleh daerah [13].

Penelitian yang dilakukan oleh [7], [14], [1], dan [15] menunjukkan adanya pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.5. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah, pelayanan kepada publik, dan pembangunan infrastruktur [14]. Kebutuhan suatu daerah dapat dicerminkan dengan luas

daerah, kadaan geografis daerah, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, kesejahteraan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat [16].

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) [17]. Pada kenyataannya saat ini beberapa daerah masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dalam urusan pembiayaan pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat diarahkan untuk belanja Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah melakukan perencanaan daerah yang cenderung sedikit dan perencanaan belanja cenderung lebih besar supaya dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah lebih besar [8].

Penelitian yang dilakukan oleh [18], [19], dan [16] menunjukkan adanya pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.6. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi [20]. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan penunjang bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya seperti penyediaan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah melalui anggaran belanja modal [18].

Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh daerah yang dianggap cukup berpotensi sebagai salah satu modal Pemerintah Daerah untuk mendanai pembangunan dan belanja daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) [4]. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen dan keyness yang menyatakan akumulasi modal adalah hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan indikator pertumbuhan ini dilihat dari besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) [21].

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh [22], [16], dan [15] menunjukkan adanya pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.7. Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah suatu indikator yang dapat memberikan suatu gambaran dari tingkat kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan balas jasa atas faktor produksi disuatu daerah [8].

Peningkatan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) akan membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan [23]. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan inventaris daerah melalui pembiayaan/pengeluaran belanja modal. Pengeluaran belanja modal yang digunakan untuk investasi merupakan salah satu usaha dalam menggerakkan perekonomian melalui penanaman modal sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) [24].

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh [1], [25], dan [26] menunjukkan bahawa terdapat pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2019 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id dan Laporan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2019 yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah melalui <https://jateng.bps.go.id/>. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 yang berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sampling jenuh. Jadi total sampel dalam penelitian ini adalah 35 sampel yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data penelitian ini dianalisis menggunakan Regresi Linear Berganda.

3.1. Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang digunakan untuk maksud pembentukan modal dengan menambah inventaris publik atau daerah yang bersangkutan melalui pembelian aset bermasa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal juga pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan untuk mempertahankan masa manfaat serta menambah kapasitas dan kualitas. Belanja Modal dapat diukur melalui laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah dari tahun 2017-2019.

3.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan dan pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya. Dalam pelaksanaan desentralisasi diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah yang dapat mendorong kemandirian keuangan daerah. Selain berkaitan tentang sumber penerimaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digunakan untuk membiayai kegiatan ataupun proyek pembangunan daerah [27]. Pelaksanaan desentralisasi diperlukan penyusunan APBD untuk menganggarkan pengeluaran atau kebutuhan daerah salah satunya alokasi belanja modal. Penyusunan alokasi belanja modal harus disesuaikan kebutuhan daerah dan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Upaya dalam meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah sebesar-besarnya [24]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur melalui laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah dari tahun 2017-2019. Menurut [4] nilai indikator variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antardaerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi [28]. Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membantu pembiayaan kekurangan daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) [8]. Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diukur melalui laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah dari tahun 2017-2019.

3.4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil dengan presentase tertentu yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah [28]. Dana Bagi Hasil (DBH) dapat diukur melalui laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah dari tahun 2017-2019.

3.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai tambah barang/jasa diakhir yang telah dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu [29]. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan dengan menggunakan dasar harga konstan karena mencerminkan pertumbuhan riil sektor ekonomi dari tahun ke tahun [30].

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Variabel

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu deskripsi atau gambaran data yang dilihat dari maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif menunjukkan data pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	105	179224408698	2066333418588	396789408248,08	277889879001,341
Dana Alokasi Umum	105	440041244000	1437036239000	971726589550,29	248994624943,497
Dana Bagi Hasil	105	18865461039	246044588085	46848378195,31	41833449478,060
Produk Domestik Regional Bruto	105	5820532	140209393	26903818,01	24918708,717
Belanja Modal	105	113622507976	1275359088966	398901632199,66	181910918682,980
Valid N (listwise)	105				

Hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 rata-ratanya mencapai Rp396.789.408.248,08 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah sebesar Rp179.224.408.698 (Kota

Pekalongan, 2018) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sebesar Rp2.066.333.418.588 (Kota Semarang, 2019).

Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 rata-ratanya mencapai Rp971.726.589.550,29. Dana Alokasi Umum (DAU) terendah sebesar Rp440.041.244.000 oleh Kota Magelang 2017-2018 dan Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi sebesar Rp1.437.036.239.000 (Kabupaten Banyumas, 2019).

Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 rata-ratanya mencapai Rp46.848.378.195,31. Dana Bagi Hasil (DBH) terendah sebesar Rp18.865.461.039 oleh Kota Magelang 2019 dan Dana Bagi Hasil (DBH) tertinggi sebesar Rp246.044.588.085 (Kabupaten Kudus, 2017).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 rata-ratanya mencapai Rp26.930.818,01 dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terendah sebesar Rp5.820.532 (Kota Magelang, 2017) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tertinggi sebesar Rp140.209.393 (Kota Semarang, 2019).

Belanja Modal (BM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 rata-ratanya mencapai Rp398.901.632.199,66 dengan Belanja Modal (BM) terendah sebesar Rp113.622.507.976 (Kota Tegal, 2018) dan tertinggi sebesar Rp1.275.359.088.966 (Kota Semarang, 2017-2018).

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji model persamaan. Hasil pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-24917412690,965	42795552242,888		-,582	,562
Pendapatan Asli Daerah	,437	,060	,668	7,325	,000
Dana Alokasi Umum	,232	,043	,318	5,404	,000
Dana Bagi Hasil	,729	,306	,168	2,381	,019
Produk Domestik Regional Bruto	-358,572	856,967	-,049	-,418	,677

Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikasi sebesar 0,000. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena nilai t signifikasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000 yang nilainya < 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 dapat diterima. Hal ini dikarenakan sumber utama penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga para Pemerintah Daerah memaksimalkan penggalian potensi daerahnya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja-belanja daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dianggarkan melalui Pendapatan Asli Daerah berasal dari masing-masing jenis retribusinya misalkan pelayanan angkutan umum berasal dari retribusi pengendalian lalu

lintas, penyediaan pencahayaan dan penerangan jalan berasal dari Pajak penerangan jalan, dan pengadaan alat peralatan pertahanan/alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia melalui intensif pengurangan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin tinggi akan mempengaruhi tingkat pengalokasian dana untuk Belanja Modal dengan taraf yang lebih tinggi. Selain itu, jika sumber penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan maka mencerminkan kinerja dari Pemerintah Daerah yang baik [31]. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan mendorong Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangannya kepada masyarakat dengan lebih bijak dengan mempertimbangkan segala pengeluaran yang berorientasi kepada masyarakat berupa pemenuhan sarana dan prasarana serta infrastruktur daerah. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjang peningkatan masa manfaat aset pelayanan publik, menambah aset pelayanan publik, dan menjaga kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [32], [31], [33], [8] dan [34] yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikansi sebesar sebesar 0,000. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena nilai t signifikansi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah mendapatkan dana transfer Pemerintah Pusat yang terbilang cukup tinggi dan dana tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik yang disalurkan untuk membiayai belanja daerahnya. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang dinilai masih banyak dibutuhkan oleh berbagai daerah dalam membantu menyediakan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur daerah [33]. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Pelayanan publik yang didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu berupa pemeliharaan dan pembangunan gedung baru baik Rumah Sakit, Sekolah, ataupun Pelayanan Sertifikat. Selain itu, penyediaan fasilitas berupa alat kesehatan, alat laboratorium, peralatan sekolah berupa meja dan kursi, perawatan mesin-mesin di instansi pemerintah, penyediaan ambulan dan lain sebagainya. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan tunjangan yang sangat besar terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas pelayan publik. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkatkan pendanaan untuk Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [31], [8], dan [34] yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [7], [35], [22], dan [36] yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikansi sebesar 0,019. Hal ini berarti Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena t signifikansi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,019 yang nilainya $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa H3 diterima. Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat digunakan oleh

Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan membangun infrastruktur didaerahnya. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal yang berarti penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan secara optimal untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup dipertimbangkan menjadi salah satu dana yang digunakan dalam rangka pembangunan daerah dan belanja modal [4].

Dana Bagi Hasil (DBH) dalam penggunaannya dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pengadaan dan pemeliharaan pelayanan publik sebagai wujud terlaksananya desentralisasi. Salah satu contoh penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah untuk Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan maka Belanja Modal juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [6], [15], dan [18] yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [37] dan [5] yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tabel diatas menunjukkan nilai t signifikansi sebesar 0,677. Hal ini berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena t signifikansi variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebesar 0,677 yang nilainya $> 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa H_4 ditolak. Hal ini dikarenakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Alokasi Belanja Modal. Selain itu, sumber pendanaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya sebagai skala pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat dan gambaran kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Pengalokasian dana untuk belanja modal tidak hanya mengacu terhadap pertumbuhan dan pergerakan ekonomi saja, namun mempertimbangkan dari sisi sosial dan politik suatu daerah [8]. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu diiringi oleh kenaikan Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [8] yang menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [1], [25], dan [26] yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

5. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengonfirmasikan data empiris dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). Jumlah populasi sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan

metode sampling jenuh yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel sehingga total sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 sampel.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ asrtinya H1 dapat diterima.
2. DAU (Dana Alokasi Umum) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ asrtinya H2 dapat diterima.
3. DBH (Dana Bagi Hasil) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,019. Nilai signifikansi $0,019 < 0,05$ asrtinya H3 dapat diterima.
4. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan nilai signifikansi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,677. Nilai signifikansi $0,677 > 0,05$ asrtinya H4 ditolak.

Referensi

- [1] M. A. F. Utomo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Modal," *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, hal. 1–10, 2020, Diakses: Apr 01, 2021. [Daring]. Tersedia pada: http://eprints.ums.ac.id/84502/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.
- [2] P. R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah," *Dpr.* hal. 249, 2004, [Daring]. Tersedia pada: <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- [3] N. N. Widiasih dan Gayatri, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 18, no. 3, hal. 2143–2171, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25832>.
- [4] S. Cahyaning, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015," *J. Ilmu Ekon. Terap.*, vol. 3, no. 1, hal. 1–38, 2018, doi: 10.20473/jiet.v3i1.7874.
- [5] Waskito, Zuhrotun, dan Rusherlisyani, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 3, no. 2, hal. 220–238, 2019, doi: 10.18196/rab.030247.
- [6] P. Galih, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2014)," *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <http://eprints.ums.ac.id/51410/>.
- [7] D. Nurjanah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

- Alokasi Khusus, Derajat Desentralisasi dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2013-2015),” *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, 2017, [Daring]. Tersedia pada: http://eprints.ums.ac.id/52209/1/NASKAH_PUBLIKASI_DESY_N.pdf.
- [8] E. D. Nopitasari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Bruto Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015),” *J. Akunt. Syariah IAIN Surakarta*, hal. 1–80, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <https://core.ac.uk/download/pdf/296469733.pdf>.
- [9] M. C. Jensen dan W. H. Meckling, “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *J. financ. econ.*, vol. 3, hal. 305–360, 1976.
- [10] L. Donaldson dan J. H. Davis, “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns,” *Aust. J. Manag.*, vol. 16, hal. 49–64, 1991.
- [11] I. A. Saraswati dan I. W. Ramantha, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi,” *E-Jurnal Akunt.*, hal. 662, 2018, doi: 10.24843/eja.2018.v24.i01.p25.
- [12] R. E. Wardiani, “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013/2014,” *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, 2017.
- [13] A. Kurniasari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, vol. 53, no. 9, hal. 1689–1699, 2019.
- [14] A. C. Handayani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, SiLPA, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016,” *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, no. 4, hal. 1–22, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3347>.
- [15] J. F. Ardianto, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016- 2018),” *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, vol. 53, no. 9, hal. 1689–1699, 2020, [Daring]. Tersedia pada: http://eprints.ums.ac.id/88416/11/Naskah_Publikasi.pdf.
- [16] D. D. Sukmaji dan A. Rohman, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017,” *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 8, no. 2013, hal. 1–9, 2019.
- [17] Aditya, Dina Mei Eka, dan Maryono, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi),” *Pros. SENDI_U 2018*, no. 33, hal. 631–639, 2018.
- [18] A. Mutiara, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal,” *J. Ekon.*, vol. 4, no. 9, hal. 2–112, 2020, [Daring]. Tersedia pada: http://repository.upstegal.ac.id/1669/1/SKRIPSI_ASTI_MUTIARA.pdf.
- [19] S. Huda dan A. Sumiati, “Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah,” *J. Ilm. Wahana Akunt.*, vol. 13, no. 2, hal. 95–109, 2018.
- [20] P. R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” hal. 68, 2004, [Daring]. Tersedia pada: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>.

- [21] Y. L. B. Sitepu, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Transfer Pemerintah Provinsi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan Produk Domestik Regional Bruto Sebagai Variabel Moderating," hal. 4–16, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/625/157017076.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [22] N. R. Imanniar, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)," *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, 2017, [Daring]. Tersedia pada: http://eprints.ums.ac.id/84569/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.
- [23] B. K. Islami dan B. O. Nababan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor 2010-2016," *Jurismata*, vol. 2, no. 1, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/625/157017076.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [24] A. Salsabillah, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016)," *J. Ilm.*, vol. 10, no. 2, hal. 1–94, 2018, [Daring]. Tersedia pada: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4829/4235>.
- [25] F. P. D. Nurwahyu, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur," *Ekon. Pembang. Univ. Jember*, 2018, [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/96731>.
- [26] Y. Simanjuntak, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Di Pulau Kalimantan)," 2019.
- [27] A. M. Oktafia, A. Soelistyo, dan Z. Arifin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur," *J. Ilmu Ekon.*, vol. 2, hal. 53–62, 2018, [Daring]. Tersedia pada: <http://202.52.52.22/index.php/jie/article/view/6966/5898>.
- [28] P. R. Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," *J. Media Huk.*, hal. 184, 2019.
- [29] D.-D. S. D. S. Statistik, "Produk Domestik Regional Bruto." Jakarta.
- [30] I. P. Ngurah dan P. Kartika, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Journal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 1, hal. 79–92, 2014.
- [31] N. Y. Aditya dan N. Dirgantari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015," *Kompartemen*, vol. XV, no. 1, hal. 42–56, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/1378>.
- [32] A. Setiawan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2017," *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, 2019, [Daring]. Tersedia pada: http://eprints.ums.ac.id/76461/16/NASKAH_PUBLIKASI_BARU.pdf.
- [33] P. S. S. Prabawati dan E. Wany, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan

- Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2013-2015,” vol. 1, no. November 2016, hal. 1–10, 2017.
- [34] S. A. Karyadi, “Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014,” *J. Profita*, no. 4, hal. 1–22, 2017, [Daring]. Tersedia pada: https://eprints.uny.ac.id/59906/1/Skripsi_Santika Adhi Karyadi_15812147034.pdf.
- [35] F. K. Nabila, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah),” *J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Surakarta*, 2017.
- [36] I. A. Maulana, E. Masitoh, dan R. R. Dewi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,” *Global*, vol. 15, no. 01, hal. 86–105, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/7102/5375>.
- [37] S. Mundiroh, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah,” *J. Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 2, no. 1, 2019, doi: 10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122.